

Lampiran Peraturan Nagari Salido Sari Bulan
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : September 2018



DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN SALIDO SARI BULAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan InayahNya, sehingga Tim penyusun RPJMDesa/Nagari Salido Sari Bulan dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) Tahun 2018 s/d 2024.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu pentingnya kita memahami penataan sebuah perencanaan, sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat.

Tahapan Penyusunan RPJMDesa/Nagari Salido Sari Bulan Tahun 2018 – 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Latar belakang penyusunan RPJMDesa/Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024, merupakan acuan bagi penentuan arah dan kebijakan pemerintah desa/Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menuju Visi Nagari Salido Sari Bulan yaitu;

“Terwujudnya Masyarakat Nagari Salido Sari Bulan yang sejahtera, Religius kreatif dan inovatif berlandaskan Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi kitabullah “

Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Ini telah mengharuskan kita untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pemerintahan Nagari diberi amanah untuk menyusun program pembangunan sendiri. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/Nagari, yang dimasukan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Nagari (Musrembang Desa/Nagari) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Penyusunan dokumen perencanaan ini dapat diselesaikan berkat dukungan penuh dari segenap Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), Warga Nagari yang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan (Musyawarah Kampung) dilingkungannya untuk merumuskan masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari dan tentu saja kerja keras segenap Tim Penyusun RPJM Nagari sendiri semenjak dibentuk.

Selaku Wali Nagari dan Ketua Tim Penyusun RPJMNagari ini melalui ruangan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada ;

1. Segenap anggota Tim Penyusun RPJMNagari, termasuk KPMN yang juga menjadi dari Tim Penyusunan RPJMNagari.
2. Para Tokoh Masyarakat yang telah memberi masukan berupa sumbang saran maupun nasehat-nasehat yang sangat berguna.
3. Pendamping Desa, Pendamping Lokal (Nagari), dan para pelatih yang telah memberikan pembekalan/pelatihan kepada Tim Penyusun RPJMNagari.
4. Segenap anggota / warga masyarakat yang atas kesadarannya bersedia ikut dalam kegiatan pengkajian keadaan Nagari sehingga bahan-bahan untuk penyusunan RPJMNagari ini dapat terkumpul.

Kami menyadari, bahwa RPJMDesa/Nagari Tahun 2018 – 2024 hasi Rancangan yang kami susun ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian di tahun yang akan datang, namun demikian semoga RPJMDesa/Nagari ini dapat dijadikan (acuan) pada saat implementasinya.

Dengan selesainya penyusunan RPJM Desa/Nagari ini, penyusun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan RPJM Desa/Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah pada kita semua, Amiin.

Salido Sari Bulan, 26 September 2018

Tim Perumus RPJMDesa/Nagari

Sekretaris Nagari



SMITRI MAL WETI

DAFTAR ISI

COVER
PERATURAN NAGARI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II PROFIL NAGARI

- 2.1 Sejarah Nagari
- 2.2 Peta dan Kondisi Nagari
- 2.3 Kelembagaan Nagari
- 2.4 Dinamika Konflik
- 2.5 Masalah dan Potensi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa/Nagari

- 3.1 Pengkajian Keadaan Nagari
- 3.2 Musyawarah Nagari RPJM Nagari

BAB IV VISI, MISI, DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

- 4.1. Visi Nagari
- 4.2. Misi Nagari
- 4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel (Matrik) Program / Kegiatan Enam Tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
4. SK. Tim Penyusun RPJM Nagari
5. Foto Kegiatan ((Sosialisasi, Musyawarah Kampung, Lokakarya, Musyawarah Desa / Nagari, Musrenbang)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 1 (satu) bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Sedangkan pada ayat 2 (dua) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun secara berjangka. Sehingga Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) untuk kurun waktu perencanaan 6 (enam) Tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Nagari yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa/Nagari (RKPDesa/Nagari), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam upaya standarisasi maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Keberhasilan Pembangunan Nasional secara makro, sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan Desa/Nagari yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Maka sangat penting bagaimana memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan operator Pemerintahan Desa/Nagari dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup antara lain ;

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan Desa/Nagari (Peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait)
- b. Efektifitas, sistem pengelolaan pembangunan Desa/Nagari
- c. Kemampuan Desa/Nagari dalam menyelenggarakan pembangunan
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa/Nagari.

RPJMDesa/Nagari ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih hasil dari Pemilihan Wali Nagari secara langsung ke dalam strategi Pembangunan Desa/Nagari, Kebijakan Umum, Program prioritas Wali Nagari, dan arah kebijakan keuangan Desa/Nagari.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dengan telah dilantikannya Wali Nagari Salido Sari Bulan *Amrizal* oleh Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 14 Mei 2018 yang lalu, maka Wali Nagari yang terpilih menindaklanjutinya dengan melakukan penyusunan RPJMDesa/Nagari Salido Sari Bulan untuk periode 2018 – 2024 sebagai dari penjabaran Visi Wali Nagari terpilih yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Nagari Salido Sari Bulan yang kreatif, inovatif dan Sejahtera, Religius berlandaskan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi kitabullah.”**

RPJMNagari sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Wali Nagari disusun oleh Tim Penyusun RPJMNagari yang dikoordinasikan Wali Nagari dengan mendapat masukan dari masyarakat yang terlibat dalam pengkajian keadaan Nagari, yaitu pengkajian untuk merumuskan masalah, penyebab, potensi, alternatif tindakan dan penentuan tindakan yang layak di Nagari. Pengkajian keadaan Nagari dilakukan dengan teknik kondisi Nagari, kalender musim, diagram kelembagaan, diskusi terarah, dan musyawarah warga.

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Wali Nagari tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen dan kesepakatan dari semua elemen masyarakat (Stakeholders) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan desa/Nagari, khususnya dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan periode dan masa jabatan Wali Nagari terpilih, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari.

Dengan tersusunnya RPJMDesa/Nagari ini, diharapkan kinerja dari aparat pemerintah Nagari dapat terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dimana RPJMDesa/Nagari akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Nagari (RKPDesa/Nagari), penyusunan APBNag, juga merupakan dasar penilaian kinerja Wali Nagari terpilih dalam melaksanakan pemerintahan Nagari, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari selama masa jabatannya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan Wali Nagari dalam penyusunan LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Wali Nagari yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), oleh karena itu, RPJMDesa/Nagari ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Salido Sari Bulan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBNagari Salido Sari Bulan dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, Transparan dan Akuntabilitas.

Pemerintah Nagari dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Nagari perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Rencana Pembangunan Desa/Nagari disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Nagari antara lain:

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024 dilakukan mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang_undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
31. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018, tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa/Nagari (RPJM Desa/Nagari) ini adalah ;

1. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Nagari Salido Sari Bulan.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Nagari yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari)
3. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakholders) pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 – 2024 adalah dokumen perencanaan Nagari untuk 6 (enam) tahun, ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, kebijakan umum, program pembangunan Nagari serta sasaran-sasaran, strategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun kedepan.

Dengan demikian, RPJM Nagari Salido Sari Bulan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Nagari, maupun dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, maka keberadaan RPJM Nagari Salido Sari Bulan Tahun 2017 – 2023 merupakan satu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan Nagari, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di Nagari untuk menyusun RKP Nagari, RAPB-Nagari, dll.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Salido Sari Bulan, yang dimaksud dengan ;

1. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa/Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa/Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
3. Desa/Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa/Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Desa/Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari, pelaksanaan Pembangunan Desa/Nagari, pembinaan Kemasyarakatan Desa/Nagari, dan pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa/Nagari
5. Pemerintahan Desa/Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa/Nagari adalah Kepala Desa/Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Desa/Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Desa/Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa/Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah/unsur dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa/Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa/Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa/Nagari tersebut.
9. Musyawarah Desa/Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa/Nagari, Pemerintah Desa/Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa/Nagari untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

10. Pembangunan Desa/Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha dan akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa/Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa/Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa/Nagari
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa/Nagari yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa/Nagari.
14. Pengkajian Keadaan Desa/Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa/Nagari`
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagari (RPJMDesa/Nagari) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang merupakan arah kebijakan pembangunan desa/Nagari, keuangan desa/Nagari, kebijakan umum yang selaras dengan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) adalah dokumen untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJMDes/Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) dan RPJMNagari.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Nagari termasuk APBNagari, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

21. Musrembang Nagari adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Nagari untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
22. Musrembang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.



1.3.2 Tujuan

Hakekat dari tujuan pembangunan desa/Nagari adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa/Nagari. RPJMDes/Nagari sebagai suatu rencana pembangunan desa/Nagari harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa/Nagari didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Dokumen rencana pembangunan desa/Nagari semestinya menerapkan prinsip-prinsip;

1. **Pemberdayaan**, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
2. dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. **Partisipatif**, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
4. **Berpihak kepada masyarakat**, yaitu seluruh proses pembangunan di Nagari secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
5. **Terbuka**, yaitu Proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Nagari untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Nagari;
6. **Akuntabel**, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Nagari maupun pada masyarakat;
7. **Lengkap**, artinya RPJM Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari;
8. **Sistematis**, artinya RPJM Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
9. **Selektif**, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
10. **Keberlanjutan**, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia sehingga setiap proses berjalan secara berkelanjutan;
11. **Cermat**, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
12. **Efisiensi dan efektif**, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
13. **Proses berulang**, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik,dan
14. **Penggalian informasi**, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan Nagari dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka RPJM Nagari Salido Sari Bulan Tahun 2018 -2024 bertujuan untuk ;

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Nagari dalam kontelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Nagari terpilih dalam kurun waktu (enam) tahun.
3. Menciptakan rasa memiliki dan Tanggungjawab Masyarakat terhadap program pembangunan Nagari;
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBNagari Salido Sari Bulan, APBD Kabupaten Pesisir Selatan. APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN serta sumber dana lainnya.
5. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan di Nagari;
6. Memberikan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran Pemerintahan Nagari;
7. Menumbuh kembangkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan Nagari;

1. 4 Manfaat

Sebagaimana halnya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsisten antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. RPJMDes/Nagari disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (program), penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (termasuk didalamnya evaluasi).

Adapun Manfaat disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Salido Sari Bulan Periode Tahun 2018-2024 antara lain :

1. Sebagai Pedoman dan Acuan Pembangunan Nagari
2. Lebih Menjamin Kesenambungan Pembangunan di Nagari
3. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan Pembangunan Supra Nagari
4. Pemberi arah kebijakan pembangunan tahunan di Nagari
5. Dapat mendorong Pembangunan Swadaya dari Masyarakat

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

1. Sekitar tahun 1800-an sebanyak 14 orang penduduk Nagari Pancung Taba Ngalau Gadang dan Limau-Limau meninggalkan Kp. mereka untuk mencari wilayah baru. Mereka berjalan kaki ke arah selatan Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara menyusuri punggung perbukitan yang terletak di belakang Kp. yang mereka tinggalkan. Sesampainya mereka di bukit **Ganduang Kuciang** (karena di bukit ini kucing yang mereka bawa bertengkar), mereka menuruni Bukit tersebut ke arah bawah sungai Batang Salido tepatnya di Bilah-bilahan, di sini mereka memilah-milah kemana arah yang akan mereka tuju.
2. Anggota rombongan dibagi dua, separuh ke Koto Lamo dan kemudian ke Bukit Sari Bulan (Kp. Koto Rawang) lalu ke selatan Koto Salido Kecil sebagian lagi mengarah ke Salido Kecil. Setelah jumlah kelompok kaum bertambah dan berkembang, mulailah mereka dengan bersama-sama (bergotong-royong) mengerjakan sawah, ladang, begitupun bandar sawah dan didirikanlah pondok tempat tinggal serta disusun aturan adat kelompok dengan kelompok lain. Kemudian dengan aturan (adat) ini maka tahulah mereka tata cara bergaul dengan jalan bersama-sama, maka di daerah kelompok yang mulai tersusun disebut dusun, artinya tersusun aturan.
3. Setelah pemikiran –pemikiran dari pemuka kelompok ini satu kata, maka daerahnya dinamakan "Koto" artinya mereka sekato. Maka di Nagari Salido Sari Bulan ada tiga buah namanya Koto semasa dulunya seperti Koto Rawang, Koto Lamo di Salido Kecil dan Koto SALIDO SARI BULAN. Kemudian koto dikumpulkan menjadi sebuah Kp., asal kata Kp. dilanjutkan menjadi Nagari. Nagari mempunyai batas-batas dan wilayah Pemerintahan. Asal kata Nagari adalah dipagari dengan adat (aturan)
4. Adapun Nagari Salido Sari Bulan ini tidaklah terjadi begitu saja, tetapi melalui aturan dan proses secara alami, dengan kata adat "**Kok Ketek nan balingka tanah, gadang nan balingka adat**" Setelah pemekaran maka Nagari Salido Sari Bulan terbagi menjadi 3 (tiga) KeNagarian yaitu Nagari Koto Rawang, Nagari Salido Sari Bulan Nagari SALIDO SARI BULAN.
5. Nagari Salido Sari Bulan terdiri dari beberapa kaum 3 (tiga) suku yaitu suku Melayu, Salido Kecil dan Caniago. Masing-masing suku **bapandam baaturan, basasok bajarami, basawah baladang, baranak bakamanakan** dan lain-lainnya. Ninik mamak di Nagari Salido Sari Bulan saat ini ada 7 (tujuh) orang dengan memakai aturan adat salingka Nagari "**buek salingka Kp.**" kepemilikan tanah yaitunya tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan ulayat Nagari.
6. Wilayah Nagari Salido Sari Bulan dulunya merupakan daerah SALIDO KECIL emas Kolonial Belanda, sehingga aktivitas pekerjaan masyarakat waktu itu adalah buruh SALIDO KECIL emas, sampai saat sekarang ini masih terlihat terowongan dan puing-puing bekas pabrik pengolahan emas.
7. Penduduk Nagari Salido Sari Bulan datang dari Lumpo dan Bayang, tapi pada umumnya berasal dari Darek Koto Anau. Setibanya di SALIDO SARI BULAN, mereka melihat batang sungai Salido keruh lalu mereka berjalan ke arah utara lalu mereka duduk di Batu Hampa Lubuk Emas (karena batu tempat duduk tersebut berhamparan). Asal kata Lubuk Emas karena lubuk ini tali urat emas terlubuk (terkumpul) tetapi belum belum diolah sampai saat ini.

8. Pada tahun 1915 banjir besar menggenangi seluruh Kp., kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa namun merusak rumah-rumah masyarakat dan menghanyutkan mesjid dan sekolah.
9. Pada tahun 1992 banjir kembali menghantam Nagari Salido Sari Bulanyang mengakibatkan masyarakat hanyut, tapi tidak menimbulkan korban jiwa. 22 rumah rusak dan ternak banyak yang hanyut.
10. Pada tahun 2012 terjadi banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan rumah rusak, jalan rusak dan jembatan putus. Banyak rumah yang rawan terhadap tanah longsor karena perumahan masyarakat banyak yang berada di tepi perbukitan.

2.2. Peta dan Kondisi Nagari

2.2.1 Peta Nagari



Nagari Salido Sari Bulan memiliki bentuk geografis yang amat beragam, mulai dari daratan, perbukitan juga lembah serta sungai.

Nagari Salido Sari Bulan memiliki batas-batas Nagari,

- sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Rawang
- sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tambang
- sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lumpo
- sebelah Timur berbatasan dengan Batang Kapas

Data jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

NO	URUTAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	
1	Kepala Keluarga	612	KK
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	1006	orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	997	orang
	Jumlah Penduduk	1903	orang
4	Lulusan SD/MI	325	orang
5	Lulusan SLTP/MTs	560	orang
6	Lulusan SLTA/MA	650	orang
7	Lulusan S1/Diploma	25	orang
8	Putus Sekolah	-	orang
9	Buta huruf	20	orang
10	Petani	128	orang
11	Buruh tani	236	orang
12	Buruh migran perempuan	47	orang
13	Buruh migran laki-laki	37	orang
14	Pegawai Negeri Sipil	15	orang
15	Pengrajin industri rumah tangga	6	orang
16	Pedagang keliling	10	orang
17	Peternak	10	orang
18	Nelayan	4	orang
19	Montir	2	orang

20	Bidan swasta	-
21	Perawat swasta	Orang
22	Pembantu rumah tangga	2 orang
23	TNI	Orang
24	POLRI	2 orang
25	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	- orang
26	Pengusaha kecil dan menengah	15 orang
27	Pengacara	Orang
28	Notaris	Orang
29	Dukun Kp. Terlatih	Orang
30	Jasa pengobatan alternatif	3 orang
31	Dosen swasta	Orang
32	Pengusaha besar	Orang
33	Arsitektur	Orang
34	Seniman/Artis	- orang
35	Karyawan perusahaan swasta	5 Orang

Keadaan lahan / tanah di Nagari Salido Sari Bulan sebagai berikut :

No	KEADAAN LAHAN/TANAH	LUAS
1	LAHAN PERTANIAN	127,5 Ha
2	LAHAN PERKEBUNAN	240 Ha
3	LAHAN TIDUR	6,75 Ha
4	LAHAN PEMUKIMAN	200 Ha
5	PERKUBURAN DAN TAMAN	1 Ha
	TOTAL LUAS	575,25 Ha

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

NO	URUTAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	SATUAN
1	Aset Prasarana umum	
	- Jalan	7,4 Km
	- Jembatan	7 Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan	
	-gedung PAUD	1 Unit
	-gedung TK	Unit
	-gedung SD	1 Unit
	-gedung SLTP	1 Unit
	-gedung SLTA	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan	
	- Posyandu	2 Unit
	- Polindes	Unit
	- MCK	5 Unit
	- Sarana Air Bersih	1 Unit
4	Aset Prasarana ekonomi	
	- Pasar Nagari	Unit
	- Tempat Pelelang Ikan	Unit
5	Kelompok Usaha ekonomi Pruduktif	
	- Jumlah Kelompok Usaha	15 Kelompok
	-Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat	15 Kelompok

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

NO	URUTAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME
1	Matrial Batu kali dan krikil	300.000 Kubik
2	Pasir	300.000 Kubik
	lahan prsawahan	63 Ha
4	lahan hutan	2500 Ha
5	Sungai	5000 M
6	tanaman perkebunan	3000 Ha

7	sumber mata air	3	Buah
8	Batu bara		
9	batu maneral (batu emas)		
10	batu akik		

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

NO	URUTAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH
1	Gotong royong	1 kali Bulan
2	Tradisi Ruwatan	Tahun
3	Pesta Rakyat (Panen Raya)	1 kali Tahun
4	Bersih Nagari	1 kali Tahun
5	Balimau Paga	1 kali Tahun

Keadaan Sosial

Kehidupan gotong royong dan saling berinteraksi dengan sesama masyarakat masih melekat erat di kehidupan masyarakat Nagari SALIDO SARI BULAN, misalnya dalam pesta perkawinan masih dilakukan dengan cara bersama-sama (*manyarayo*) begitu pula dengan kegiatan lainnya kehidupan saling tolong menolong masih melekat dalam masyarakat.

Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Nagari Salido Sari Bulan umumnya masih tergolong menengah ke bawah dimana mata pencaharian terdiri dari 80 % di sektor pertanian dan 20 % di sektor lainnya. Hasil pertanian antara lain padi dan jagung, di bidang perkebunan antara lain karet, coklat dan gambir. Pada saat ini sebagian besar hutan Nagari Salido Sari Bulan sudah masuk TNKS maka masyarakat mengalami kesulitan untuk mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan, oleh karena itu untuk menambah pendapatan masyarakat lebih banyak bekerja keluar dari Nagari Salido Sari Bulan karena hasil panen hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sementara. Masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan ber jumlah 394 KK, karena itu Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan mengusahakan supaya kehidupan masyarakat meningkat dan terlepas dari belenggu kemiskinan dengan berbagai usaha yang produktif.

2.2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari

Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Salido Sari Bulan, kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 20 Nagari di Kecamatan IV Jurai yang mempunyai jarak 13 Km dari kota kabupaten. Kecamatan IV Jurai sendiri merupakan salah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Salido Sari Bulan sendiri terletak di perbatasan sebelah Barat Nagari Lumpo, utara Nagari Koto Rawang, timur Kecamatan Batang Kapas, dan selatan berbatasan dengan Nagari Bunga Pasang. Nagari Salido Sari Bulan letak

topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari Salido Sari Bulan adalah petani.

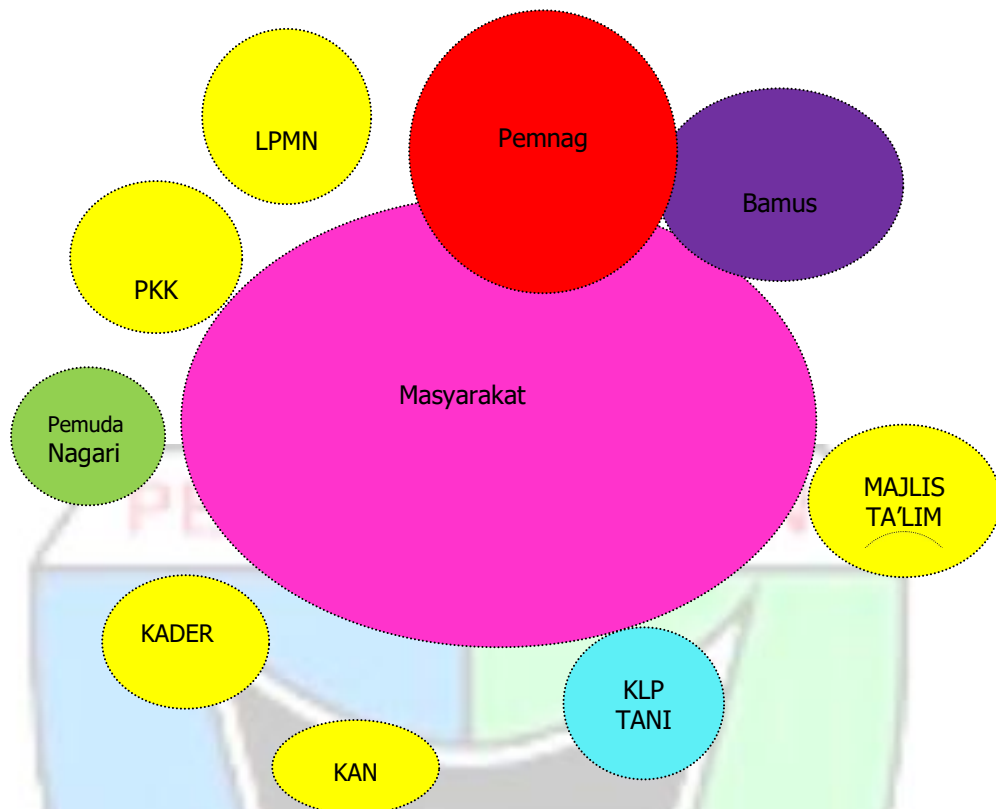
Nagari Salido Sari Bulan terdiri dari 2 Kp. yaitu Kp. Salido Kecil Kp. Koto Lamo, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, (1) satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), 2 (Dua) orang kepala Urusan (Kaur) 2 Orang Kepala Seksi (KASI) dan 2 (dua) orang Kepala Kp., mempunyai 612 Kepala Keluarga jumlah penduduk 2021 orang yang terdiri dari 1057 orang laki-laki, 964 orang perempuan, dan dengan Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 394 RTM.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Salido Sari Bulan merupakan kebutuhan yang menarik terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.



Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

2.3.Kelembagaan Nagari



No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemnag dan Bamus	Sebagian anggota Bamus Jarang ikut dalam rapat Nagari	Struktur Pemnag lengkap
2	LPMN	Masih banyak kader LMPN yang Kurang Aktif	Kepengurusan lengkap
3	Pemuda Nagari	Generasi muda tidak tanggap terhadap kegiatan pemerintahan Nagari	Kepengurusan lengkap
4	PKK	Jarang Pertemuan anggota	Kepengurusan lengkap
5	KAN	Ninik mamak sama sekali tidak mampu mencontohkan prilaku sopan santun, tau jorangedek kamalantiang.	Kepengurusan lengkap
6	KADER	Masih ada Kader yang belum tahu dengan tugasnya	Kepengurusan ada
7	Majlis Ta'lim	Majlis Ta'lim kurang aktif	Kepengurusan ada
8	Kelompok Tani	Kelompok tani	Kepengurusan ada

2.4. Dinamika Konflik

2.5. Masalah dan Potensi

2.5.2 Permasalahan

Kondisi yang dihadapi Nagari Salido Sari Bulan di era otonomi Nagari ke depan sangat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang cukup serius dan bersungguh-sungguh. Sejalan dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifikasi adanya 6 (enam) issue-isue strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi Nagari saat ini ;

1. **Bidang Pemerintahan ;** kemampuan aparat yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurangnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah Nagari masih belum menemukan solusi karena lembaga yang ada tidak mendapatkan bimbingan teknis dan belum sepenuhnya dijalankan dengan program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari, antara lain;
 - a. Belum optimalnya fungsi BAMUS Nagari dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
 - b. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan Nagari sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - d. Belum tersusunnya Peraturan Nagari sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - e. Belum optimalnya kerjasama Nagari dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.
 - f. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah Nagari yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, responsif dan akuntabel belum dapat terwujud.
 - g. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.

h. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Nagari, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.

i. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip Nagari dan saran prasaran pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip Nagari.

j. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Nagari dan dokumen-dokumen lainnya.

k. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

l. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.

m. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

2. Pembangunan ;

a. Kualitas Jalan dan Jembatan yang belum baik

b. Sarana Prasarana Areal Pertanian

c. Kurang Memadainya sarana Prasarana Pendidikan

d. Kurang Memadainya sarana Prasarana Kesehatan

3. Bidang Pemberdayaan ;

a. Kurangnya Keterampilan pemuda/pemudi putus sekolah

b. Kurangnya Sarana Prasarana Olah Raga

c. Kurangnya Sarana Pendukung Kader – Kader Nagari

4. Bidang Pembinaan;

a. Kurangnya Pembinaan terhadap Pemuda

b. Kurangnya pembinaan terhadap Kelompok Kesenian

c. Kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan KAN

d. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok majelis Ta'lim

5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak

a. Wilayah Salido Sari Bulan yang berada di perbukitan yang rawan bencana;

2.5.2 Potensi

Sebagaimana pada umumnya Nagari-Nagari sudah barang tentu sangat kaya dengan sumber daya alam, baik berupa keindahan alam. Apalagi Nagari Salido Sari Bulan merupakan salah satu Nagari yang termasuk kedalam Wilayah pengunungan dengan potensi Nagari sebagai berikut ;

- a. Bidang Pemerintahan ;* karakter aparatur dan masyarakat yang demokratis, karakter masyarakat yang terbuka, dan adat istiadat serta budaya masyarakat yang benjunjung tinggi kejujuran..
- b. Bidang Pembangunan ;* Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan dan Saluran Air dan Jembatan, merupakan asset besar dalam proses Pembangunan Nagari Salido Sari Bulan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.
- c. Bidang Pemberdayaan ;* Potensi di bidang Pemberdayaan meliputi; Adanya Guru TPA/TPSA; Pemuda – Pemuda/Pemudi Usia Produktif; Kader – Kader Nagari
- d. Bidang Pembinaan; Potensi Nagari adanya kelompok Rebana dan Majelis Taklim dan Kelembagaan KAN*
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari;* Potensi Nagari; semangat gotong royong dan tingkat swadaya masyarakat Nagari.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1. Pengkajian Keadaan Nagari

Pengkajian Keadaan Nagari adalah : adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa/Nagari. Dalam upaya Pengkajian Keadaan Nagari dapat digunakan 3 (tiga) alat kerja, diantaranya; Menggunakan Sketsa Nagari; Diagram Kelembagaan/Diagram Veen dan Kalender Musim.

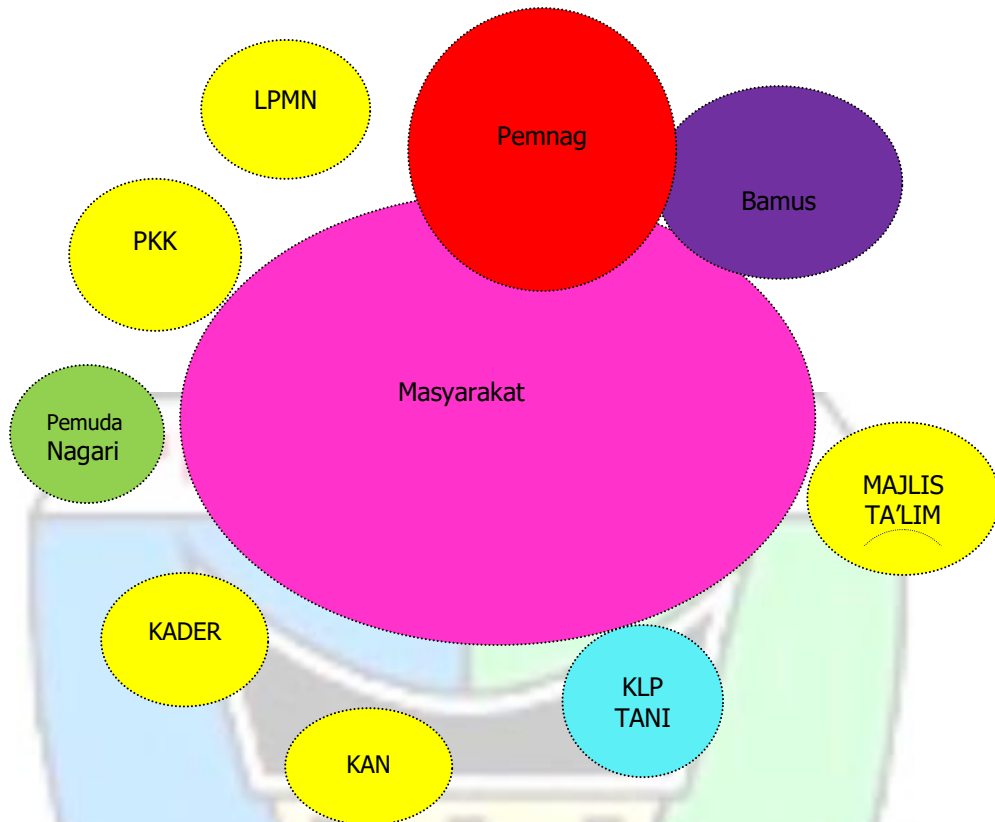
3.1.1. Pengkajian keadaan Nagari menggunakan sketsa Nagari

Kp.	Masalah	Potensi
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	pendidikan sbb:	Guru, murid dan lokasi ada
Koto Lamo	1. Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, merosotnya mutu generasi karena biaya transportasi sekolah mahal.	Guru, murid dan lokasi ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	2. Kurangnya kesejahteraan guru TPA/TPSA/di Masjid dan di Mushalla	Murid putus sekolah banyak
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	3. Banyaknya anak putus sekolah dan pemuda tidak punya keterampilan khusus dan tidak punya keahlian non formal	Guru dan SDM ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	4. Banyaknya perempuan yang dirumah saja tidak mempunyai keahlian untuk menambah pendapatan rumah tangga	Generasi muda banyak
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	5. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, sehingga petani sering mengalami gagal panen	ibu-ibu dan pemuda banyak, SDM ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	6. Banyaknya wanita produktif yang tidak punya keterampilan	Sawah luas, perkebunan luas
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	7. Kurangnya kesejahteraan Kader	Sdm ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	8. Kurangnya melembaga nilai-nilai prinsip dalam tata kehidupan bermasyarakat berNagari, (pelatihan adat istiadat)	Guru dan murid ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	9. Pelatihan tata rias kelompok perempuan	Sdm ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	10. Pelatihan menjahit untuk generasi muda	Sdm ada
	Kesehatan	
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	1. Banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan kartu sehat, Jamkesda, jamkesmas dan BPJS	Warga miskin ada
	2. Banyaknya masyarakat tidak berdaya untuk mencari mobil (Transportasi) ketika menderita sakit / kematian di angkut	Puskesmas ada

Koto Lamo		3. kerumah sakit, karena ambulan Nagari tidak ada	
		Sarana prasarana Sbb :	
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	1. Di sepanjang jalan alternatif ketika hujan tergenang air disebabkan draenase tidak ada	Sirtukil ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	2. Tali bandar sawah sering longsor karena masih tanah tidak stabil harus parit miring	Sirtukil ada
SALIDO BULAN	SARI	3. Sarana dan prasarana kantor wali Nagari tidak memeadai selaku pelayanan masyarakat Nagari antara lain belum adanya tempat parkir	Sirtukil ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	4. Mesin pengelola tanah sawah tidak ada untuk kelompok tani sehingga untuk pengeloan tanah mahal	Lahan dan kelompok tani ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	5. Sarana kantor KAN tidak ada sehingga tempat pemufakatan adat menumpang	Lembaga ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	6. Banyaknya rumah tidak layak huni	Lokasi ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	7. Sarana ibadah masih di pakai untuk TPA/TPSA karena belum ada Gedung TPA/TPSA	Lokasi ada
		Pembinaan sbb :	
		1. Rabana dan seragam majlis taklim belum cukup	Anggota rabana ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	2. sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan pemuda kurang memadai	Pemuda ada
		3. Perusahaan yang ada di Nagari Salido Sari Bulan belum mensejahterakan masyarakat	Perusahaan ada sdm ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	4. Belum sempurnanya lembaga KAN menurut sebagaimana mestinya	Lembaga dan masyarakat ada
		Pertanian	
		1. Menurunnya hasil panen karena serangan hama	Petani dan lahan pertanian ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	2. Susahnya mendapatkan bibit unggul	Petani dan lahan pertanian ada
		8. Mesin pengelola tanah sawah tidak ada untuk kelompok tani sehingga untuk pengeloan tanah mahal	Lahan dan kelompok tani ada
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	9. Perkebunan	
		1. Susahnya masyarakat medapatkan bibit gambir, pala, kopi, dan cengkeh ungul serta bibit palawija (semangka, kacang-kacangan, jagung)	Petani dan lahan pertanian ada
		Peternakan	
Kp. Salido Koto Lamo	Kecil	1. Susahnya mendapatkan bibit sapi smental serta usaha pengemukan	peternak dan lahan peternakan ada
		A. Sulitnya masyarakat dalam pengelolaan pakam ternak	

Kp. Salido Kecil Koto Lamo	10. Susahnya masyarakat mendapatkan bibit itik gurun	peternak dan lahan peternakan ada
	11. Perikanan	
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	Tidak bermanfaatnya lubuk sebagai sumber ekonomi masyarakat (Bibit dan pakam ikan)	peternak dan lahan peternakan ada
	Tidak bermanfaatnya kolam masyarakat karena kurangnya bibit dan pakam	peternak dan lahan peternakan ada
	5. Kehutanan 6. Banyaknya hutan gundul karen tidak ada penanaman kembali karena susahnya mendapatkan bibit kayu jati dan kayu Harmoni	Petani dan lahan pertanian ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	Tanah ulayat Nagari dialih fungsikan untuk taman kerinci seblan (TNKS) ketika dipandang patok batas sangat dekat dengan pemukiman masyarakat dan peladangan masyarakat	Petani dan lahan pertanian ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	7. Ekonomi	
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	1. Usaha menjahit dan perbengkelan tidak berkembang	Pengusaha dan jasa ada
	B. Sulitnya mendapatkan modal untuk perkembangan warung dan baru sebagian yang terbiaya oleh kelompok SPP	Sdm ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	2. Kelompok SPP yang ada seperti Mekar sari ,Seroja, bunga Salido Kecil,gang Akhirat, Elviro, Sakura, perlu tambahan modal	Sdm ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	3. Hutan TNKS mengandung sumberdaya alam, emas, perak, tembaga (SALIDO KECILklonial belanda) tidak boleh di olah sehingga tidak bermanfaat bagi msyarakat	Sdm ada
	4. Sulitnya masyarakat membangun rumah karena pengambilan kayu terlarang	Lokasi perumahan ada
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	5. Susahnya dalam pembagian beras raskin karena pasokan beras sangat kurang	Penerima banyak
Kp. Salido Kecil Koto Lamo	1. waktu pesta pelaminan selalu didatangkan dari luar Kp.	Bundo kandung ada
	C. kelompok perempuanan sebagian tidak punya modal karena tidak punya boroh anggunan	SDM ada

3.1.2 Pengkajian keadaan Kelembagaan menggunakan Diagram Venn



No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemnag dan Bamus	Sebagian anggota Bamus Jarang ikut dalam rapat Nagari	Struktur Pemnag lengkap
2	LPMN	Masih banyak kader LMPN yang Kurang Aktif	Kepengurusan lengkap
3	Pemuda Nagari	Generasi muda tidak tanggap terhadap kegiatan pemerintahan Nagari	Kepengurusan lengkap
4	PKK	Jarang Pertemuan anggota	Kepengurusan lengkap
5	KAN	Ninik mamak sama sekali tidak mampu mencontohkan prilaku sopan santun, tau jorangedek kamalantiang.	Kepengurusan lengkap
6	KADER	Masih ada Kader yang belum tahu dengan tugasnya	Kepengurusan ada
7	Majlis Ta'lim	Majlis Ta'lim kurang aktif	Kepengurusan ada
8	Kelompok Tani	Kelompok tani	Kepengurusan ada

3.1.3 Pengkajian keadaan Nagari menggunakan Kalender Musim

No	Kp.	Musim	Masalah	Potensi
1.	Salido Kecil		1. Ketika hujan air meluap kejalan 2. Sawah belakang Taluak tidak ada saluran 3. Sepanjang jalan Kp. rawan longsor	Swadaya dan sirtukil ada Swadaya dan sirtukil ada Swadaya dan sirtukil ada
			Banyak masyarakat kekeringan	Lokasi, SDM, dan sirtukil ada
		Panca roba	Penyakit banyak berjangkit (DBD dan Malaria)	
2.	Koto Lamo		1. Ketika hujan air meluap ke jalan 2. Sawah seberang sungai Koto Lamo tidak ada saluran 3. Sepanjang jalan Kp. rawan longsor	Swadaya dan sirtukil ada Swadaya dan sirtukil ada
			Banyak masyarakat kekeringan	Lokasi, SDM, dan sirtukil ada
		Panca roba	Penyakit banyak berjangkit (DBD dan Malaria)	

3.1.4 PENGELOMPOKAN MASALAH

No	Masalah	Potensi	Lokasi
1	Sub Bidang Pendidikan sbb: 1. Banyaknya anak putus sekolah sehingga tidak memiliki ijazah pendidikan formal (SMP dan SMA)	Guru, murid dan lokasi ada	
	2. Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM, merosotnya mutu generasi karena biaya transportasi sekolah mahal.	Murid putus sekolah banyak	
	3. Kurangnya kesejahteraan guru TPA/TPSA/di Masjid dan di Mushalla	Guru, murid, ada	
	4. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini	Guru dan SDM	
	5. Banyaknya anak putus sekolah dan pemuda tidak punya keterampilan khusus dan tidak punya keahlian non formal	Generasi muda banyak	
	6. Banyaknya perempuan yang dirumah saja tidak mempunyai keahlian untuk menambah pendapatan rumah tangga	ibu-ibu dan pemuda banyak, SDM ada	
	7. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang pertanian, sehingga petani sering mengalami gagal panen	Sawah luas, perkebunan luas	
	8. Banyaknya wanita produktif yang tidak punya keterampilan	Sdm ada	
	9. Kurangnya kesejahteraan Kader	Guru dan murid ada	
	10. Kurangnya melembaga nilai-nilai prinsip dalam tata kehidupan bermasyarakat berNagari, (pelatihan adat istiadat)	Sdma ada	
	Sub Bidang Kesehatan sbb :		
2	1. Air bersih belum memadai	Lokasi ada	
	2. Banyaknya warga miskin yang belum mendapatkan kartu sehat, Jamkesda, jamkesmas	Warga miskin ada	
	3. Penyakit mutaber selalu berkembang ketika musim kemarau panjang karena warga membuang hajat dan sampah kesungai	Lingkungan ada	
	4. Kurangnya kesejahteraan kader posyandu, (Sukarela)	Kader ada, posyandu ada	
	5. Mobiler posyandu tidak ada	Posyandu dan kader ada	
	6. Kelompok lansia kurang terurus	Lansia ada	
	7. Kurangnya gizi Lansia, balita dan anak usia dini	Lansia, anak usia dini ada	
	8. Rusaknya pemukiman masyarakat ketika banjir	Sirtukil ada	
	9. Di khawatirkan masyarakat mendapatkan penyakit rabies karena banyaknya anjing suka menggigit (tidak terurus) berkeliaran di Kp.	Anjing ada	
3	Sub Bidang Masalah Sarana Prasarana Sbb :		
	1. Sulitnya perhubungan antar Nagari Salido Sari Bulan akibat terbelengkalainya jalan lingkar olo kotorawang menuju lumpo	Lokasi siap pembebasan lahan	
	2. Jalan Kp. baru berlobang dan masih ada jalan tanah	Sirtukil ada	
	3. Sulitnya mobil keluar masuk Kp. baru karena jembatan belum permanen	Sirtukil ada	

	4. Jalan setapak di belakang olo rusak	Sirtukil ada	
	5. Sampah setiap hari di buang kesungai karena tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS)	Lokasi ada	
	6. Di sepanjang jalan alternatif ketika hujan tergenang air disebabkan grenase tidak ada	Sirtukil ada	
	7. Tali bandar sawah sering longsor karena masih tanah tidak stabil harus parit miring	Sirtukil ada	
	8. Sarana dan prasarana kantor wali Nagari tidak memeadai selaku pelayanan masyarakat Nagari antara lain halaman sempit tidak adatepat parkir	Sirtukil ada	
	9. Mesin pengelola tanah sawah tidak ada untuk kelompok tani sehingga untu pengeloan tanah mahal	Lahan dan kelompok tani ada	
	10. Sarana kantor KAN tidak ada sehingga tempat pemufakatan adat menumpang	Lembaga ada	
	11. Banyaknya rumah tidak layak huni	Lokasi ada	
	12. Sarana ibadah masih di pakai untuk TPA/TPSA karena belum ada Gedung	Lokasi ada	
	13. Renovasi kantor kepaa desa lama akan di jadikan gedung serbaguna	Sirtukil ada	
	14. Sumber air bersih pipanya rusak berat	Lokasi ada	
	15. Sering terjadi kecelakaan karena jalan arternatif terlalu sempit	Lokasi siap pembebasan lahan	
	16. Normalisasi batang salido untuk mengatasi banjir	Lokasi dan sirtukil ada	
4	Sub Bidang Masalah Sosial budaya sbb:		
	1. Rabana majlis taklim belum ada	Anggota rabana ada	
	2. Hilangnya kesenian tradisional	Adm ada	
	3. Tidakadanya sarana dan prasarana olah raga untuk kegiatan pemuda	Pemuda ada	
	4. Perusahaan per SALIDO SARI BULANan yang ada di Nagari Salido Sari Bulanbelum mensejahterakan masyarakat	Perusahaan ada sdm ada	
	5. Pemakaian tanah ulayat kaum dan Nagari dipergunakan untuk per SALIDO SARI BULANan dan perjanjian kerjasama (MOU) tidak jelas	Sdm ada	
	6. Belum sempurnanya lembaga KAN menurut sebagaimana mestinya	Lembaga dan masyarakat ada	
B	Sub Bidang Pertanian		
1	Pertanian	Petani dan lahan pertanian ada	
	1. Menurunya hasil panen karena serangan hama		
	2. Susahnya mendapatkan bibit unggul yang tahan hama wereng	Petani dan lahan pertanian ada	
2	Sub Bidang Perkebunan		
	1. Susahnaya masyarakat medapatkan bibit gambir, pala, kopi, semangka, jagung, kacang dan cengkeh unggul	Petani dan lahan pertanian ada	
3	Sub Bidang Peternakan		

	1. Susahnya mendapatkan bibit sapi smental serta usaha pengemukan 2. Sulitnya masyarakat dalam pengelolaan pakam ternak	peternak dan lahan peternakan ada	
	3. Susahnya masyarakat mendapatkan bibit itik gurun	peternak dan lahan peternakan ada	
4	Sub Bidang Perikanan sbb:		
	1. Tidak bermanfaatnya lubuk sebagai sumber ekonomi masyarakat (Biit dan pakam ikan)	peternak dan lahan peternakan ada	
	2. Tidak bermanfaatnya kolam masyarakat karena kurangnya bibit dan pakam	peternak dan lahan peternakan ada	
5	Sub Bidang Kehutanan sbb:		
	1. Banyaknya hutan gundul karen tidak ada penanaman kembali karena susahna mendapatkan bibit kayu jati dan kayu Harmoni	Petani dan lahan pertanian ada	
	2. Tanah ulayat Nagari dialih fungsikan untuk taman kerinci seblan (TNKS) ketika dipandang patok batas sangat dekat dengan pemukiman masyarakat dan peladangan masyarakat	Petani dan lahan pertanian ada	
6	Sub Bidang Ekonomi sbb:		
	1. Usaha menjahit dan perbengkelan tidak berkembang	Pengusaha dan jasa ada	
	2. Silitnya mendapatkan modal untuk perkembangan warung dan baru sebagian yang terbiaya oleh kelompok SPP	Sdm ada	
	3. Kelompok SPP yang ada perlu tambahan modal	Sdm ada	
	4. Hutan TNKS mengandung sumberdaya alam, emas, perak, tembaga (SALIDO KECILklonial belanda) tidak boleh di olah sehingga tidak bermanfaat bagi msyarakat	Sdm ada	
	5. Sulitnya masyarakat membangun rumah karena pengambilan kayu terlarang	Lokasi perumahan ada	
	6. Susahnya dalam pembagian beras raskin karena pasokan beras sangat kurang	Penerima banyak	
7	Sub Bidang Koperasi dan usaha masyarakat sbb :		
	1. waktu pesta pelaminan selalu didatangkan dari luar Kp.	Bundo kandung ada	
	2. kelompok perempuananan sebagian tidak punya modal karena tidak punya boroh anggunan	SDM ada	

3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

Musyawarah Nagari dilaksanakan setelah adanya Laporan Hasil Pengkajian Nagari oleh Tim Penyusun RPJM, Musyawarah Menyepakati beberapa hal, diantaranya ; menyepakati Hasil Pengkajian Nagari; Menyepakati Arah Kebijakan Pembangunan Nagari untuk 6 (enam) tahun kepemimpinan Wali Nagari yang mengacu pada Visi dan Misi Walinagari. Setelah Musyawarah Nagari dilaksanakan maka Tim Penyusun RPJM menyusun Rancangan RPJM Nagari yang mengacu pada Berita Acara Hasil Musyawarah Nagari dan dituangkan dalam format Rancangan RPJM Nagari. Rancangan RPJM Nagari memuat visi, dan misi Wali Nagari, arah kebijakan Pembangunan Nagari serta Rencana Kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggualang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.

Setelah Tim Menyusun Rancangan RPJM Nagari yang mengacu pada hasil Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari Selanjutnya Wali Nagari melaksanakan Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANG) Nagari. Musrenbang Nagari Membahas dan Menyepakati Rancangan RPJM Nagari Salido Sari Bulan periode 2018-2024, Hasil dari Musrenbang ini yang menjadi lampiran Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari Salido Sari bulan yang akan ditetapkan bersama BAMUS yang selanjutnya ditanda tangani Walinagari menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari Salido Sari bulan periode 2018-2024 dan diundangkan oleh Sekretaris Nagari dalam Lembaran Nagari.



BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. VISI

Rumusan visi dan misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi ke depan, sehingga rumusan visi harus sejalan dengan ciri-ciri khas atau unik masyarakat ke depan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan ke dalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan Visi dan Misi.

Visi Nagari Salido Sari Bulan adalah **"Terwujudnya Masyarakat Nagari Salido Sari Bulan yang sejahtera, kreatif, inovatif dan Religius berlandaskan Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi kitabullah.**

4.2 Misi

Misi untuk mencapai visi Nagari Salido Sari Bulan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan sosial untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan memaksimalkan organisasi keagamaan , lembaga Adat dan lembaga lainnya yang ada di Nagari sehingga mampu berperan Aktif sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya
3. Meningkatkan pengelolaan dan menggali potensi sumber daya Nagari untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pendapatan Nagari menuju desa Mandiri.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,transparansi,penegakan hukum,berkeadilan,kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas

Arah Kebijakan RPJM Nagari Salido Saribulan periode 2018 – 2024 dapat dilihat pada matrik keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Nagari Salido Saribulan berikut ini:

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan sosial untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Nagari	a. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas c. Meningkatnya	1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi 2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan 4. Meningkatkan pembangunan	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan b. Meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan,

		ketersediaan sarana prasarana perdagangan d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata	dan pemeliharaan sarana prasarana dibidang pemerintahan	industri dan sektor pariwisata c. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan d. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan e. Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan
	2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Nagari	a. Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Nagari b. Meningkatnya ketersediaan alat-alat kesehatan di Nagari		
	3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan	a. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan b. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan		
	4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan	a. Meningkatkan ketersediaan gedung kantor beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan Nagari		
2. Meningkatkan dan memaksimalkan organisasi keagamaan , lembaga Adat dan lembaga lainnya yang ada di Nagari sehingga mampu berperan Aktif sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya	1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat b. Menurunnya angka kematian bagi ibu melahirkan c. Menurunnya angka kematian bayi d. Menurunnya revalensi kekurangan gizi pada anak balita.	1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin 2. Meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan penyakit 3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat	a. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional b. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan
	2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat	a. Semakin minimalnya presentase absensi para pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular		
	3. Meningkatkan taraf	a. Menurunnya	1. Meningkatkan fasilitas bantuan	a. Meningkatkan

	pendidikan masyarakat	angka buta aksara bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas b. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA	operasional satuan pendidikan yang ada di Nagari 2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah raga	penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan b. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk kelulusan pendidikan c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah raga
	4. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan	a. meningkatnya tingkat keberhasilan lulusan pendidikan kejuruan		
	5. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	a. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (Karang Taruna) b. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda		
	6. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat	a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga b. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan		
3. Meningkatkan pengelolaan dan menggali potensi sumber daya Nagari untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pendapatan Nagari menuju desa Mandiri.	1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas	a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi 2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan. 3. Meningkatkan kerja sama pemerintah Nagari dengan investor guna pengembangan agrowisata 4. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaringan kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani 5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi	a. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan b. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan c. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian d. Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat
	2 Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas	a. Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.		
	2 Meningkatkan peran pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas	a. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian. b. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman		
	3 Meningkatkan penguasaan	a. Meningkatnya ketrampilan usaha		

		ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri dan pariwisata b. Meningkatkan dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat c. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata d. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan Mikro (BUMNag) dan /atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat		
	4. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pembangunan guna meningkatkan perekonomian	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam 2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan 3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing	a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup b. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam c. Mewujudkan kondisi wilayah Nagari Salido Sari Bulan yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik
	5. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	a. Meningkatkan upaya reboisasi b. Meningkatkan ketersediaan air tanah/sumber air c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam		
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,transparansi,p enegakan hukum,berkeadilan,kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat	a. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan b. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pelayanan program keluarga berencana c. Dalam perencanaan pembangunan Nagari diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Nagari dan etos kerja birokrasi 2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public) 3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan Nagari	a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan Nagari sesuai kompetensi yang dibutuhkan b. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari
	2. Meningkatkan	a. Meningkatnya		

	kualitas demokratisasi di Nagari	iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum b. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Nagari yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal	d. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang demokratis f. Meningkatkan kesetahaeraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat	a. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi b. Meningkatkan kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku c. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan Nagari	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) ini wajib menjadi panduan dalam pelaksanaan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun ke depan baik oleh Pemerintah Nagari maupun Lembaga-lembaga Nagari yang lainnya. Semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengutamakan keswadayaan masyarakat dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lain, termasuk perusahaan yang ada di Kabupaten maupun Provinsi.

Lembaga-lembaga Nagari dan Masyarakat Nagari tidak saja menjadi pemanfaat atas dokumen ini tetapi juga berkewajiban untuk memantau atau mengawasi pelaksanaannya. Implementasi tahunan yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan yang di susun Wali Nagari perlu dievaluasi setiap tahun untuk mengkaji hambatan pelaksanaannya dan mencari alternatif pembiayaan dengan fasilitasi Wali Nagari dan Lembaga-lembaga Nagari.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan memberikan berkat, kekuatan kepada Wali Nagari, pimpinan lembaga-lembaga Nagari dan seluruh masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat Nagari yang sejahtera, sehat dan mandiri.

Salido Sari Bulan, 26 September 2018

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



Tabel 1**PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI MENGGUNAKAN SKETSA NAGARI**

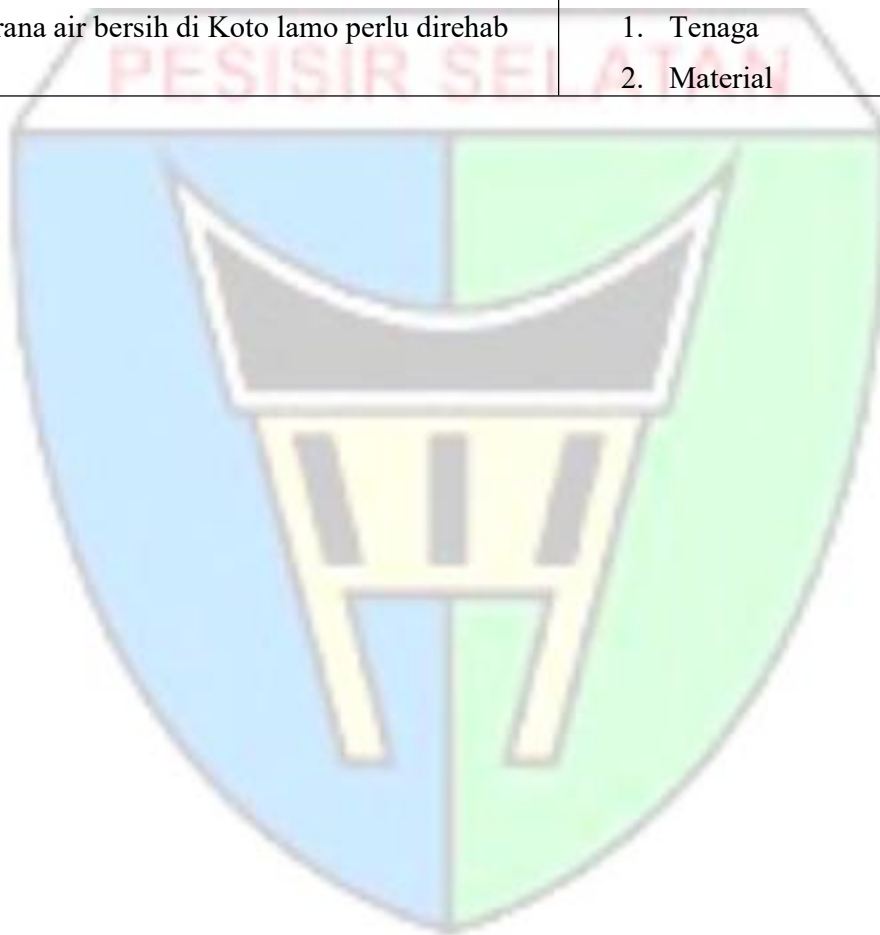
No	Masalah	Potensi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Belum adanya Gapura Jalan Utama Nagari Salido Sari Bulan	1. Tenaga Kerja 2. Lahan 3. Material
2	Gedung TK belum ada	1. Siswa Ada 2. Guru Ada
3	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	1. Kader Ada
4	Masih adanya KK miskin yang belum menikmati sambungan listrik	1. KK Miskin
5	Masih banyak Rumah tidak layak huni di Kampung Salido Kecil dan Koto lamo	1. Lahan 2. Tenaga Kerja 3. Material
6	Kurangnya kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ	1. Siswa ada 2. Guru ada
7	Gedung Kantor Wali Nagari kurang memadai	1. Lahan 2. Tenaga Kerja 3. Material
8	Masih adanya KK Miskin yang belum mempunyai Jamban Sehat	1. Lahan 2. Tenaga Kerja 3. Material
9	Banyaknya anak putus sekolah di usia remaja	1. Siswa ada
10	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesehatan	1. Bidan ada
11	Masih ada ibu rumah tangga yang belum membawa anaknya ke Posyandu	1. Balita 2. Bidan
12	Kurangnya Pengetahuan ibu rumah tangga tentang program KB	1. Bidan ada
13	Peralatan medis di Pustu masih kurang	1. Gedung 2. Bidan
14	Penanganan ibu hamil dan anak belum maksimal	1. Bidan ada
15	Belum adanya Posyandu di Kapo-Kapo	1. Balita ada

16	Masih kurangnya SDM Perangkat Nagari	1. Perangkat Nagari
17	Perlu pelatihan petugas keamanan (LINMAS)	1. Anggota ada
18	Kegiatan PKK kurang aktif	1. Ibu-ibu PKK
19	Saluran air (darnase) sepanjang 200 meter tidak lancar di Koto lamo	1. Tenaga Kerja ada 2. Material tersedia
20	TPT di SMP sepanjang 75 meter belum ada	1. Tenaga Kerja 2. Material
21	Jalan sepanjang 200 meter	1. Tenaga Kerja 2. Material tersedia
22	Jalan sepanjang 75 meter	1. Tenaga Kerja 2. Material ada
23	Jalan dan Jembatan menuju Majid di Koto lamo rusak	1. Tenaga Kerja ada 2. Material tersedia
24	Belum adanya Tugu Batas Nagari	1. Tenaga Kerja Ada 2. Material ada
25	Belum tersedianya Mobil Ambulance	1. Masyarakat
26	Belum tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran Mini	1. Sopir ada 2. Tenaga Kerja ada
27	Lapangan Sepak Bola belum siap	1. Pemuda ada
28	Jalan menuju pemakaman dikampung Salido Kecil belum ada	1. Lahan tersedia 2. Tenaga Kerja ada 3. Material ada
29	Jalan lingkaran sepanjang 300 meter di samping SD 05 belum ada	1. Lahan tersedia 2. Tenaga Kerja ada 3. Material ada
30	Belum adanya Kantor Lembaga-lembaga Nagari	1. Tenaga Kerja ada
31	Belum adanya Rumah Pengelolaan Sampah	1. Tenaga Kerja ada 2. Lahan
32	Beronjong belum ada disepanjang aliran sungai di Koto lamo	1. Tenaga Kerja ada 2. Material tersedia
33	Abrasi sungai Koto lamo sangat memprihatinkan mendekati pemukiman masyarakat	1. Masyarakat 2. PemNag 3. Instansi terkait
34	Salido Kecil masih ada yang tersedia aliran listrik	1. Masyarakat 2. PemNag

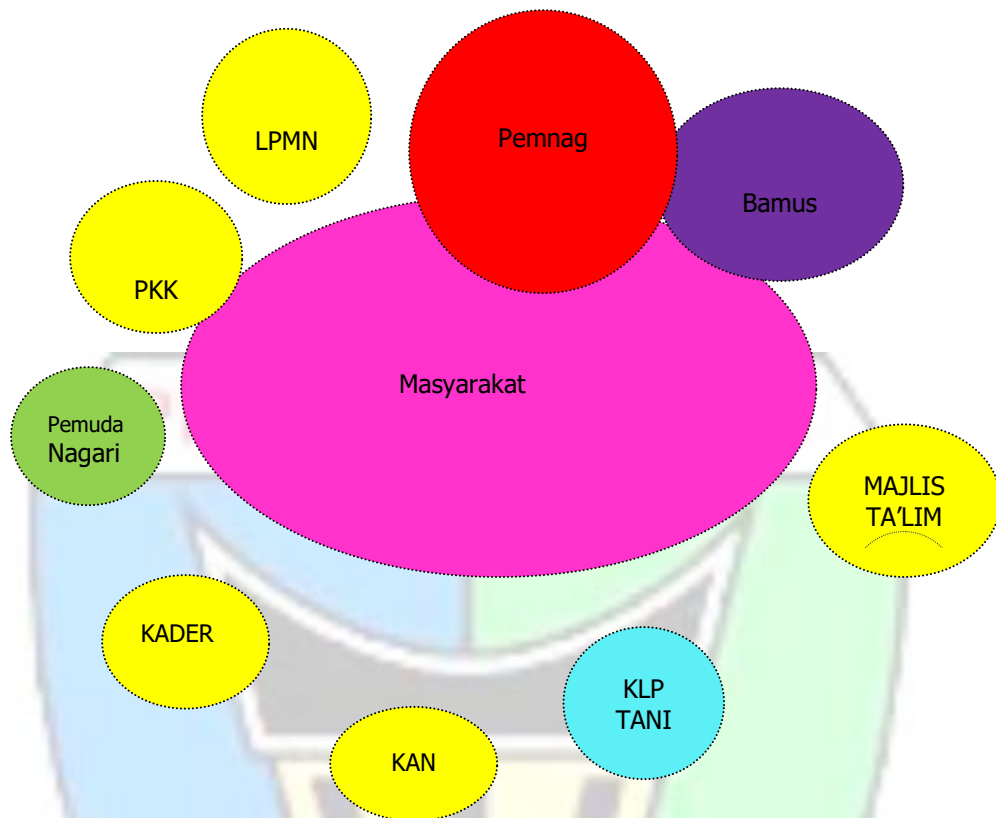
35	Di Salido Kecil belum tersedianya Tower Pemancar	1. Masyarakat 2. PemNag
36	Petani padi sering mengalami kesulitan sarana produksi pertanian terutama pupuk pada musim tanam	1. Petani 2. Kelompok Tani
37	Belum tersedianya Hand Tractor	1. Petani 2. Kelompok Tani 3. PemNag
38	Belum ada budidaya ikan air tawar (Kolam/Keramba)	1. Lokasi 2. Kelompok Nelayan 3. Masyarakat
40		1.
41	Belum ada pelatihan tentang Home Industri	1. PKK 2. Karang Taruna 3. Ekowisata
42	Mobiler dan perlengkapan PAUD sangat minim	1. Siswa ada 2. Tenaga Pengajar 3. PemNag
43	Kelengkapan belajar mengajar TPQ/TPSQ sangat minim	1. Santri 2. Tenaga Pengajar 3. Gedung ada
44	Posyandu masih menumpang di Poskesri	1. Kader ada 2. Balita
45	Jaminan Kesehatan Masyarakat masih sedikit	1. KK Miskin 2. Masyarakat
46	Belum ada pos Ronda Kampuan Teleng	1. Masyarakat 2. Kepala Kampung
47	Papan Informasi Nagari tidak ada	1. Aparatur Lengkap 2. Kantor ada
48	BUMNAG belum mandiri	1. Masyarakat 2. PemNag
49	Tanaman produksi padi tidak maksimal	1. Kelompok Tani 2. Petani
50	Serangan hama pada tanaman padi sangat kuat (tikus dan burung)	1. Petani 2. Kelompok Tani
51	Penerangan lampu jalan masih minim	1. Tiang ada

		2. PLN
52	Sulitnya transportasi membawa hasil tani, nelayan dan pendidikan	1. Lahan 2. Material
53	Tidak adanya tempat penyeberangan/jembatan penghubung ke SMP 6 maupun ke SD 15	1. Lahan ada 2. Material
54	Sulitnya transportasi untuk mengevakuasi pemukiman penduduk	1. Pemukiman Penduduk 2. Tenaga ada
55	Kurangnya kesadaran pemuda tentang keamanan dan kewaspadaan masyarakat Nagari	1. Karang Taruna 2. Linmas
56	Masih banyaknya pemuda-pemudi yang pengangguran	1. Banyaknya pengangguran
57	Banyaknya kotoran ternak yang belum dimanfaatkan masyarakat	1. Pemukiman
59	Pencemaran sungai disebabkan banyak tumpukan sampah	1. Tenaga ada
60	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesenian tradisional dan modern	1. Kelompok 2. Masyarakat
61	Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan alat-alat pelaminan	1. Kelompok 2. Masyarakat
62	Kurangnya pengetahuan tentang adat dan sarak	1. Pemuda 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat
63	Kurangnya lapangan kerja usaha masyarakat	1. Kelompok 2. Masyarakat
64	Kurangnya pengetahuan ibu-ibu PKK tentang pembuatan kue	1. Ibu Rumah Tangga 2. Kelompok Kuliner
65	Irigasi tidak berfungsi	1. Tenaga ada 2. Sumber Air
66	Tidak serentaknya petani dalam pengolahan lahan	1. Kelompok Tani 2. Petani 3. Sumber Air
67	Perawatan cacao, karet butuh pembinaan	1. Lahan ada 2. Petani 3. Kelompok Tani
68	Kurangnya kesejahteraan aparatur	1. Perangkat Nagari

	Pemerintahan Nagari	2. Anggota Bamus
69	Kurangnya modal untuk kelompok usaha kecil dan pedagang	1. Pedagang 2. Kedai-Kedai
70	Perlunya penyuluhan tentang tata cara bertani dengan baik	1. Petani 2. Kelompok Tani
71	SDM pengurus Gapoktan dan Kelompok masih belum maksimal	1. Petani
72	Masih kurangnya sarana olah raga	1. Tenaga 2. Pemuda/Pemudi
73	Sarana air bersih di Koto lamo perlu direhab	1. Tenaga 2. Material



Tabel 2
PENGKAJIAN KEADAAN KELEMBAGAAN MENGGUNAKAN DIAGRAM VEEN



No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemnag dan Bamus	Sebagian anggota Bamus Jarang ikut dalam rapat Nagari	Struktur Pemnag lengkap
2	LPMN	Masih banyak kader LMPN yang Kurang Aktif	Kepengurusan lengkap
3	Pemuda Nagari	Generasi muda tidak tanggap terhadap kegiatan pemerintahan Nagari	Kepengurusan lengkap
4	PKK	Jarang Pertemuan anggota	Kepengurusan lengkap
5	KAN	Ninik mamak sama sekali tidak mampu mencontohkan prilaku sopan santun, tau jorangedek kamalantiang.	Kepengurusan lengkap
6	KADER	Masih ada Kader yang belum tahu dengan tugasnya	Kepengurusan ada
7	Majlis Ta'lim	Majlis Ta'lim kurang aktif	Kepengurusan ada
8	Kelompok Tani	Kelompok tani	Kepengurusan ada

Tabel 3

PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI MENGGUNAKAN KALENDER MUSIM

No	Kampung	Musim	Masalah	Potensi
1.	Salido Kecil		Jalan Salido Sari Bulan becek P 400 m L 3 m di saat hari hujan	Jalan dan tenaga ada
2.	Koto lamo		Sulit nya para petani mengolah lahan	Lahan ada,Petani ada
3.	Salido Kecil		Jalan Salido Sari Bulan becek P 400 m L 4 m di saat hari hujan	Jalan dan tenaga
4.	Koto lamo		Masyarakat serig kekeringan dan kebakaran lahan	Lahan ada,Petani

Tabel 4
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan sosial untuk menunjang kelancaran perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Nagari	e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi f. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas g. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan h. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata	5. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi 6. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti luas 7. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan 8. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang pemerintahan	f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan g. Meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri dan sektor pariwisata h. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan i. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan j. Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan
	5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Nagari	c. Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Nagari d. Meningkatnya ketersediaan alat-alat kesehatan di Nagari		
	6. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan	c. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan d. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan		
	7. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan	b. Meningkatkan ketersediaan gedung kantor beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan Nagari dan lembaga kemasyarakatan Nagari		
3. Meningkatkan dan memaksimalkan organisasi keagamaan, lembaga Adat dan lembaga lainnya yang ada di Nagari sehingga mampu berperan Aktif sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya	7. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat	e. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat f. Menurunnya angka kematian bagi ibu melahirkan	4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin 5. Meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan penyakit 6. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat	c. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional d. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan

		g. Menurunkan angka kematian bayi h. Menurunkan revalensi kekurangan gizi pada anak balita.		kesehatan
	8. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat	c. Semakin minimalnya presentase absensi para pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan d. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular		
	9. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	c. Menurunkan angka buta aksara bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas d. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA	5. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di Nagari 6. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah raga	d. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan e. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk kelulusan pendidikan f. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah raga
	10. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan	b. meningkatkan tingkat keberhasilan lulusan pendidikan kejuruan		
	11. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	c. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (Karang Taruna) d. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda		
	12. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat	c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga d. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan		
3. Meningkatkan pengelolaan dan menggali potensi sumber daya Nagari untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat dan pendapatan Nagari menuju desa Mandiri.	1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas	a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura b. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	6. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi 7. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.	e. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan f. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengola
	2 Meningkatkan	b. Meningkatnya	8. Meningkatkan kerja sama	

	pemasaran hasil pertanian dalam arti luas	akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan.	pemerintah Nagari dengan investor guna pengembangan agrowisata	han pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan
	6 Meningkatkan peran pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas	c. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian. d. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman	9. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaringan kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani 10. Meningkatkan penyediaan sarana produksi pertanian sarana irigasi melalui pompanisasi	g. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian h. Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat
	7 Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri dan pariwisata	e. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri f. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat g. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata h. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan Mikro (BUMNag) dan /atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat		
	8 Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan 6. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing	d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup e. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam f. Mewujudkan kondisi wilayah Nagari Salido Sari Bulan yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik
	9 Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	d. Meningkatnya upaya reboisasi e. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air f. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan		

		bencana alam		
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi,transparansi,pe negakan hukum,berkeadilan,kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	4. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat	d. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan e. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pelayanan program keluarga berencana f. Dalam perencanaan pembangunan Nagari diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.	4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Nagari dan etos kerja birokrasi 5. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public) 6. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan Nagari	g. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan Nagari sesuai kompetensi yang dibutuhkan h. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari i. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Nagari j. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan k. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang demokratis l. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	5. Meningkatkan kualitas demokratisasi di Nagari	c. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum d. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Nagari yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal		
	6. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat	d. Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi e. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku f. Meningkatnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan Nagari		